

**Nama: Tazki Alfikri**

**NPM: 2313031028**

### **1) Analisis Struktur Pengeluaran**

Jika dilihat dari komposisinya, struktur belanja pendidikan di Provinsi Nusantara Raya belum sepenuhnya efisien. Porsi anggaran yang sangat besar untuk gaji dan tunjangan guru, yaitu mencapai 68%, menunjukkan bahwa sebagian besar dana habis untuk belanja rutin, sementara dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan belum optimal. Hal ini diperparah dengan distribusi guru yang tidak merata, di mana terjadi kelebihan guru di wilayah perkotaan tetapi kekurangan di daerah terpencil. Di sisi lain, alokasi untuk infrastruktur dan bantuan siswa masih relatif kecil, padahal keduanya sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses. Oleh karena itu, perlu dilakukan realokasi anggaran dengan cara mengefisienkan belanja pegawai melalui redistribusi guru, serta meningkatkan investasi pada infrastruktur, terutama digital, dan program-program yang langsung berdampak pada hasil belajar siswa.

### **2) Analisis Sumber Pembiayaan**

Dari sisi pembiayaan, sistem yang ada saat ini masih sangat bergantung pada pemerintah daerah, sehingga ruang untuk inovasi pendanaan menjadi terbatas. Ketergantungan ini juga berisiko apabila terjadi keterbatasan fiskal di daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya diversifikasi sumber pembiayaan dengan melibatkan sektor swasta dan skema alternatif lainnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah kerja sama antara pemerintah dan swasta (*public-private partnership*), khususnya dalam pengembangan infrastruktur dan digitalisasi sekolah. Selain itu, kolaborasi dengan dunia usaha dapat diarahkan pada peningkatan keterampilan siswa agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Skema lain seperti hibah berbasis kinerja dan kemitraan dengan lembaga non-profit juga dapat menjadi alternatif untuk mendukung pembiayaan pendidikan secara lebih berkelanjutan.

### **3) Perbandingan dengan Negara OECD**

Jika dibandingkan dengan praktik di negara-negara OECD, terdapat beberapa elemen yang cukup relevan dan realistis untuk diadopsi. Misalnya, penerapan *performance-based budgeting* yang mengaitkan alokasi anggaran dengan hasil kinerja, serta pendekatan pembiayaan berbasis kebutuhan siswa untuk meningkatkan keadilan distribusi. Selain itu, fokus pada peningkatan kualitas guru dan penggunaan sistem evaluasi berbasis data juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, implementasi kebijakan tersebut di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan data yang akurat dan terintegrasi, kapasitas manajemen di tingkat daerah yang belum merata, serta potensi resistensi dari birokrasi. Ketimpangan infrastruktur antar wilayah juga menjadi hambatan dalam penerapan sistem berbasis data secara optimal.

### **4) Rancangan Reformasi Pembiayaan (5 Tahun)**

Dalam jangka menengah, reformasi pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya perlu dirancang secara bertahap dan terarah. Dari sisi struktur belanja, pemerintah perlu mengurangi dominasi belanja pegawai secara perlahan melalui kebijakan redistribusi guru dan efisiensi anggaran, serta meningkatkan alokasi untuk infrastruktur dan program peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam hal peningkatan kualitas guru, kebijakan dapat difokuskan pada pelatihan berkelanjutan, pemberian insentif berbasis kinerja, serta penempatan guru yang lebih merata.

Selanjutnya, digitalisasi sekolah menjadi agenda penting, terutama dengan memperluas akses internet, menyediakan perangkat pembelajaran digital, dan meningkatkan literasi teknologi bagi guru dan siswa. Di sisi lain, mekanisme monitoring dan evaluasi perlu diperkuat melalui penggunaan sistem berbasis data dengan indikator kinerja yang jelas, terutama yang berfokus pada hasil belajar siswa. Transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi prinsip utama agar kebijakan yang dijalankan dapat diawasi dan dievaluasi secara berkelanjutan.